

**PRAKTIK PARADIPLOMASI DALAM SEKTOR BUDAYA: STUDI KASUS
KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* PEMERINTAH DAERAH DI
YOGYAKARTA DAN PEFEKTUR KYOTO**

SKRIPSI



Oleh:

NOVERA AMALYA CINTA

19323007

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

PRAKTIK PARADIPLOMASI DALAM SEKTOR BUDAYA: STUDI KASUS

KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* PEMERINTAH DAERAH DI

YOGYAKARTA DAN PEFEKTUR KYOTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NOVERA AMALYA CINTA

19323007

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Praktik Paradiplomasi dalam Sektor Budaya: Studi Kasus Kerja Sama Sister
Province Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dan Prefektur Kyoto**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

06 April 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.
- 3 Hadza Min Fadlhi Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

HALAMAN MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu" QS. Al-Mukmin [40]: 60

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” QS. At-Taubah

[9]: 40

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan” QS. Al-Insyirah [94]: 6

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. dalam proses pengerjaan skripsi, penulis menyadari bahwa besarnya bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya dalam proses panjang perjalanan perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Ibu Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang Bapak berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.

6. Dosen-dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas dedikasinya dalam mengajar dan membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu orang tua penulis yang selalu menyertakan doa, perhatian, kasih sayang, serta menjadi penenang di setiap kondisi kalut yang dilewati. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan dukungan yang besar atas setiap langkah dan keputusan yang saya ambil.
8. Kakak laki-laki saya yang selalu memberikan kekuatan dan afirmasi positif kepada saya.
9. Sahabat saya Thifany, Khairani, Fazri, Fauzan, dan Bima yang selalu ringan tangan untuk membantu, menghibur, dan memberikan semangat. Terima kasih atas seluruh doa-doa baiknya. Semoga Allah hadiahkan banyak hal baik pula kepada kalian.
10. Teman-teman Marcomm FPSB dan DP UII yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas bantuan, arahan, doa, dan semangatnya kepada saya selama proses perkuliahan ini.
11. Teman-teman seperjuangan HI UII Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih karena telah menjadi teman baik saya selama berkuliah di HI UII.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vii
Pernyataan Integritas Akademik	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Argumen Sementara.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	12
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB II KERJA SAMA <i>SISTER PROVINCE</i> DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KYOTO	15
2.1 Motif Kerja Sama DIY dan Prefektur Kyoto	15

2.2	Regulasi Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah di Indonesia	17
2.3	Kerja Sama <i>Sister Province</i> DIY dan Prefektur Kyoto	19
BAB III INSTITUSIONALISAI KERJA SAMA <i>SISTER PROVINCE</i>		
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KYOTO	23
3.1	Departemen Khusus untuk Urusan Kerja Sama Internasional	23
3.2	Kantor Subnasional yang Permanen di Luar Negeri.....	25
3.3	Kunjungan Resmi yang Dilakukan Pemerintah Daerah ke Negara Asing.....	26
3.4	Berpartisipasi dalam Agenda Internasional yang Diselenggarakan oleh Daerah Mitra.....	28
3.5	Pembentukan Kelompok Kerja Regional.....	30
3.6	Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Agenda Internasional.....	31
BAB IV KESIMPULAN.....		33
4.1	Kesimpulan	33
4.2	Rekomendasi.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....		35
LAMPIRAN.....		38

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24
---	----



Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Juli 2022.



Novera Amalya Cinta

ABSTRAK

Konsep paradiplomasi semakin mendapatkan perhatian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir seiring dengan makin terlibatnya aktor subnasional ke dalam hubungan internasional. Yogyakarta dan Kyoto merupakan dua kota yang terlibat secara aktif dalam paradiplomasi dengan tujuan mempromosikan kebudayaan dan memperluas jaringan internasionalnya. Kerja sama ini diinisiasi oleh kedekatan antara kedua pemimpin daerah dan kerja sama *sister province* ini berhasil diresmikan pada 1985 melalui kesepakatan MoU. Penelitian ini akan melihat dinamika kerja sama tersebut dari sudut pandang Kuznetsov. guna mengkaji implementasi praktik paradiplomasi antara DIY dan Kyoto sejak tahun 2012 hingga tahun 2022

Kata Kunci: Provinsi Bersaudara, Paradiplomasi, Yogyakarta, Kyoto.



ABSTRACT

The concept of paradiplomacy has gained increasing attention in recent year as subnational actors become more involved in international relations, Yogyakarta and Kyoto are two cities that have actively engaged in paradiplomacy, to promote their cultural and expand their international networks. This collaboration was initiated by the closeness between two regional leaders and this sister province cooperation successfully formalized in 1985 through an MoU agreement. This paper will look at the dynamics of this cooperation from the concept of paradiplomacy according to Kuznetsov's point of view to examine the implementation of paradiplomacy practices between DIY and Kyoto from 2012 – 2022.

Key Words: *Sister Province, Paradiplomacy, Yogyakarta, Kyoto*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi membuka jalan untuk aktor subnasional dalam melaksanakan aktivitas internasional selaras dengan perkembangan diplomasi yang bersifat adaptif dalam merespon situasi global yang semakin terintegrasi dalam menghadapi isu-isu yang semakin kompleks. Orientasi kerja sama aktor subnasional diubah dari kerja sama antar daerah menjadi kerja sama internasional, kerja sama pemerintah daerah dengan pihak asing tersebut diwujudkan dalam praktik paradiplomasi (Mukti, 2015). Paradiplomasi merupakan kajian yang terbilang cukup baru dalam studi hubungan internasional yang merujuk pada aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh entitas subnasional dalam rangka untuk meraih kepentingan daerah.

Studi hubungan internasional bergerak semakin dinamis dari hari ke hari. Sehingga, isu-isu internasional juga turut meluas ke banyak bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Diperlukan adanya inovasi dan kolaborasi pemikiran dari banyak aktor untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dengan keterlibatan aktor subnasional (Subagyo, 2016). Tantangan dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya kerja sama dengan pemerintah dari negara lain baik kerja sama dalam bidang ekonomi, ketenagakerjaan, budaya, maupun pendidikan. Langkah awal kerja sama ini lebih dulu ditempuh dengan pembuatan perjanjian atau MoU (*Memorandum of*

Understanding) dengan pemerintah subnasional dari negara lain, kemudian melaksanakan aktivitas diplomasi dan negosiasi.

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menganut sistem demokrasi dan menerapkan sistem otonomi daerah pada wilayah-wilayah provinsi. Sistem otonomi daerah memperkenalkan pemerintah daerah untuk memegang wewenang sebesar-besarnya dalam mengatur segala urusan di dalam daerahnya, termasuk menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri. Dewasa ini, pemerintah lokal atau daerah otonom semakin menggeliat dalam berkecimpung secara internasional (Wolff, 2009). Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah lama menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri yang didasarkan pada prinsip pelaksanaan kerja sama luar negeri pada UU No. 37 tahun 1999 tentang Prinsip Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap penyelenggara hubungan luar negeri, baik aktor pemerintah maupun aktor non pemerintah harus mengikuti peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional dan diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri.

Lebih lanjut (Mukti, 2020) menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri tetap menjadi pintu keluar masuk untuk semua urusan dengan pihak luar negeri atau yang sering dikenal dengan kebijakan *One Gate Policy*. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat 5 tujuan pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri. Kelima tujuan tersebut yakni 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Pertukaran budaya, 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen

pemerintahan, 4) Promosi potensi daerah, dan 5) Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang aktif melaksanakan aktivitas internasional, termasuk aktivitas paradiplomasi. Praktik paradiplomasi antara Yogyakarta dan Kyoto ini dimulai dari kesepakatan yang ditandatangani oleh Sri Pakualam VIII selaku Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta dan Yukio Hayashida, Gubernur Kyoto kedua pemimpin yang menjabat kala itu yang sepakat untuk bekerja sama dalam agenda kerja sama *sister province*. Kerjasama ini tergolong unik karena proses pembentukannya didorong oleh kedekatan antara kedua pemimpin. Ide kerjasama antar kedua daerah ini diinisiasi pertama kali oleh Yukio Hayashida, yang sebelumnya telah mempelajari kekayaan budaya di Yogyakarta sejak ia bertugas saat Perang Dunia II yang didukung penuh oleh Sri Pakualam VIII.

DIY memiliki cita-cita sebagai daerah dengan pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka tahun 2025 mendatang di mana visi ini tercantum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang. Upaya untuk mencapai cita-cita tersebut selaras dengan strategi pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan daerah dengan berlandaskan pada bidang kebudayaan. Kebudayaan juga merupakan salah satu dari tiga *leading sectors* dari perekonomian Yogyakarta selain pariwisata dan pendidikan. Hal ini membawa Yogyakarta berhasil dinobatkan sebagai ASEAN *City of Culture* pada 2018-2020 lalu saat pertemuan ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) ke-delapan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Wahyuni, 2018).

Kerja sama *sister province* DIY dan Kyoto berangkat dari kesamaan latar belakang antar kedua wilayah tersebut di mana keduanya merupakan daerah pusat kebudayaan. Pada MoU yang telah ditandatangani pada 16 Juli 1985 lalu, keduanya sepakat untuk bekerja sama pada bidang: 1) Seni dan kebudayaan, 2) Pendidikan dan Teknologi sains, 3) Promosi pariwisata dan 4) Industri (Treaty Kementerian Luar Negeri, 1985). Sebagai strategi dalam mencapai visi DIY tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk terlibat semakin aktif dalam aktivitas internasional melalui misi penguatan diplomasi budaya. Sehingga, urusan kebudayaan merupakan salah satu pondasi dalam mewujudkan visi tersebut.

Kerja sama *sister province* Yogyakarta dan Kyoto ini sepakat untuk bekerja sama pada sektor-sektor yang multidimensi. Namun, kedua daerah meletakkan orientasi kerja sama keduanya pada kebudayaan, hal ini dilandaskan karena sektor budaya menjadi identitas dari masing-masing daerah tersebut. Keduanya memiliki fokus utama dalam memperhatikan dan mempertahankan kebudayaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan keduanya sepakat untuk mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan yang dilaksanakan melalui agenda kerja sama internasional. Mengingat kerja sama ini telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama yang dimulai dari tahun 1985, sehingga penting untuk melihat bagaimana kerja sama antara keduanya ini berlangsung. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat kerja sama tersebut dalam tinjauan institusionalisasi untuk melihat bagaimana kerja sama berlangsung. Dengan demikian, penulis mengambil judul penelitian “Praktik Paradiplomasi dalam Sektor Budaya: Studi

Kasus Kerja Sama *Sister Province* Pemerintah Daerah di Yogyakarta dan Prefektur Kyoto.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan praktik paradiplomasi Pemerintah DIY dalam kerja sama *Sister Province* dengan Prefektur Kyoto dalam sektor budaya dilihat dari tinjauan institusionalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan ini bermaksud untuk membahas bagaimana kerja sama paradiplomasi antara Pemerintah DIY dan Prefektur Kyoto dalam sektor budaya.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini fokus membahas terkait kerja sama paradiplomasi yang dilaksanakan oleh DIY dan Prefektur Kyoto di bidang kebudayaan khususnya dalam proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi. DIY merupakan salah satu provinsi yang aktif dalam melaksanakan aktivitas kerja sama paradiplomasi. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadi batasan penulis dalam membatasi penelitian terkait kerja sama tersebut hanya pada proses institusionalisasi.

Selain itu, berdasarkan Perda DIY No. 6 Tahun 2013 memuat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017 menegaskan prioritas arah pembangunannya pada bidang yang multidimensi salah satunya yakni kebudayaan. Aspek ini juga dimuat kembali pada Perda No 3 Tahun 2018 mengenai RPJMD tahun 2017-2022 di mana visi pembangunan DIY diutarakan dalam semangat ‘Silang Budaya’ (BPK, nd). Rencana Pembangunan

dari tahun 2012-2022 ini berjalan selaras untuk mencapai visi jangka panjang DIY pada tahun 2025 mendatang.

Dilengkapi dalam rencana pembangunan tersebut bahwa budaya akan menjadi arus utama atau payung bagi sektor lain. Tak hanya itu, keutamaan pembangunan kebudayaan juga akan memperkuat identitas daerah baik di dalam maupun luar negeri. Paradiplomasi menjadi salah satu langkah strategis bagi pemerintah dalam mencapai visi mendatang. Sehingga penting untuk dilihat bagaimana praktik paradiplomasi khususnya dalam sektor budaya ditinjau dari proses institusionalisasinya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan berbagai pencarian terhadap beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai tinjauan penelitian. Habib Alfarisi menguraikan hadirnya paradiplomasi bertujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing serta diciptakan berdasarkan kesamaan dari visi atau misi maupun masalah yang sedang dihadapi yang kemudian bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi sehingga tercapai kepentingan masing-masing atau dapat saling berbagi dan belajar dari kota lain melalui kerja sama kota kembar atau *sister city*. Adanya demokrasi menjadi salah satu pendorong hadirnya paradiplomasi. Hal ini dikarenakan demokrasi mengubah sudut pandang setiap orang bahwasanya ketika menyelesaikan sebuah masalah dalam hubungan antara negara dengan pihak lain untuk tidak menggunakan kekerasan (Alfarisi, 2021).

Alfarisi fokus mendeskripsikan mengenai historis serta kegiatan-kegiatan kerja sama secara rinci yang telah dilakukan oleh DIY dan Kyoto dari tahun 2015 hingga tahun 2020 dan menelaah beberapa hambatan yang dialami oleh kedua belah pihak dalam mengadakan kerja sama. Adapun kerja sama tersebut diwujudkan dalam pertukaran sosial, budaya, pendidikan, dan lainnya. Penelitian ini memberikan kelebihan berupa gambaran bahwa telah terdapat hasil kerja sama antara DIY dan Kyoto sebagai hal yang kolaboratif dan insentif sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Pemerintah DIY dan telah menjalin kerja sama dengan beberapa provinsi di luar negeri. Kerja sama yang terjalin tersebut didasarkan oleh aspek-aspek kesamaan atau *similarities, sistership*, serta telah memenuhi aspek kesederajatan dengan daerah di luar negeri. (Supriyanto & ATT, 2014) dalam tulisannya menjelaskan mengenai potensi-potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui berbagai jalinan kerja sama bersama pihak luar negeri, alasan mengapa terdapat kerja sama yang berjalan dan tidak berjalan, dan bagaimana pemerintah daerah melakukan optimalisasi terhadap potensi daerahnya. Dalam tulisannya, juga dijelaskan lebih jauh bahwa terdapat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur berjalan tidaknya kerja sama, yakni: narahubung profesional, kelembagaan yang dibentuk dan diatur sesuai dengan kesepakatan kedua daerah, serta dana yang mencukupi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja sama. Bersama pemerintah pusat yang dalam hal ini dibantu oleh Kementerian Luar Negeri juga bersikap proaktif dalam melakukan optimalisasi kerja sama *sister province* tersebut.

Hadirnya paradiplomasi di tengah-tengah aktivitas hubungan internasional merupakan hasil dari perkembangan pesat globalisasi yang mendorong kemajuan di hampir semua aspek. Tak terkecuali Yogyakarta yang memanfaatkan peluang ini untuk menjalin kerja sama dengan aktor subnasional dari daerah di negara lain salah satunya bersama dengan prefektur Kyoto. Dalam perjalanan kerja samanya selama puluhan tahun, kedua daerah ini menemui dinamika naik dan turun. (Gunawan & Susanto, 2020) dalam penelitiannya membahas mengenai keberhasilan dari kerja sama *sister province* tersebut. Tulisan ini juga menilik dan mengkaji lebih jauh mengenai keterbatasan kerja sama dilihat dari evaluasi program-program kerja sama yang telah terlaksana. Penelitian ini menemui bahwa kerja sama kedua daerah ini berhasil dengan disertai catatan masyarakat perlu peningkatan masyarakat agar lebih partisipatif. Tugas lain yang juga perlu diperbaiki ialah adanya birokrasi yang rumit, kurangnya sumber daya manusia, dan porsi anggaran yang terbatas menjadi hambatan tersendiri yang perlu segera diselesaikan. Lebih lanjut penelitiannya juga menjelaskan adanya keterkaitan yang signifikan antara dukungan politik dari pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberhasilan dari kerja sama ini.

Dari beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kerja sama paradiplomasi antara DIY dengan Kyoto dalam sektor budaya, belum ada penelitian yang secara lebih spesifik membahas mengenai proses institusionalisasi dari kerja sama *sister province* DIY dan Kyoto. Oleh karena itu, penulis dalam tulisan ini akan lebih fokus membahas mengenai proses institusionalisasi kerja sama paradiplomasi antara DIY dengan Kyoto dalam sektor budaya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Paradiplomasi diperkenalkan pertama kali oleh Panayotis Soldatos, Ilmuwan asal Basque dan dikembangkan oleh Ivo Duchacek pada tahun 1980an. Asal kata *paradiplomacy* merupakan penggabungan dari kata '*parallel diplomacy*' (Duchacek, 2001). Diuraikan lebih lanjut oleh Aldecoa, Keating dan Boayer, istilah tersebut mengacu pada kebijakan luar negeri oleh pemerintah non pusat. Landasan kerja sama pemerintah subnasional dalam panggung Hubungan Internasional ini sangat bervariasi dalam bentuk, intensitas maupun tujuan.

Paradiplomasi umumnya disebut dalam literatur akademik sebagai keterlibatan unit konstituen (wilayah) negara nasional dalam urusan internasional. Penulis menggunakan pendapat dari Kusnetsov yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul '*Theory and Practice of Paradiplomacy*' dalam penelitian ini untuk memahami teori dan konsep mengenai paradiplomasi. Kuznetsov mengidentifikasi adanya peningkatan tren kegiatan internasional dari pemerintah daerah dan mulai memperkenalkan istilah paradiplomasi untuk menggambarkan langkah dan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam konteks kerja sama internasional.

Paradiplomasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mempromosikan kepentingan daerah yang selaras dengan kepentingan nasional dalam panggung internasional. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai aspek kerja sama seperti kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan bidang lainnya. Paradiplomasi dapat menjadi saluran penting untuk membangun jaringan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak internasional. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Kuznetsov

dalam bukunya bahwa paradiplomasi merupakan “*communication for reaching economic, cultural, political, or any other types of benefits, the core of which consists in self-sustained actions of regional governments with foreign governmental and non-governmental actors*” (Kuznetsov, 2015).

Lebih lanjut dituturkan dalam tulisannya, bahwa terdapat empat motif yang berbeda yang melatar belakangi pemerintah daerah dalam membangun kerja sama luar negeri yakni ekonomi, budaya, politik, dan pembenahan lintas batas. Motivasi ekonomi menjadi dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pasar dunia. Keuntungan ini akan didapat dari proses interaksi dengan aktor asing. Selain ekonomi, motif lainnya dari aktor pemerintah daerah yang melaksanakan paradiplomasi adalah kebudayaan. Faktor budaya merupakan insentif penting bagi paradiplomasi, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki kekhasan budaya yang kental. Tak heran jika kemudian langkah awal dibentuknya kerja sama dimulai dengan mencari aktor asing yang memiliki kesamaan identitas budayanya. Selain itu, kerja sama dapat pula dilandaskan oleh tujuan politik di mana pemerintah bermaksud untuk memperoleh panggung internasional untuk mendapatkan status otonomi yang lebih tinggi. Motif lainnya yang menjadi latar belakang yakni adanya tujuan untuk pembenahan lintas batas yang menjadi kebutuhan masing-masing pemerintah daerah dalam mencari solusi terbaik dari permasalahan-permasalahn yang muncul pada lintas batas seperti lingkungan, transportasi dan logistik. Keempat motif tadi dapat bersifat tumpang tindih atau bisa saja dominan hanya terpaku pada satu motif.

Melihat paradiplomasi dari sudut pandang Kuznetsov, terdapat enam bentuk institusionalisasi atau upaya pemerintah daerah dalam melakukan paradiplomasi.

Hal ini menjelaskan secara spesifik mengenai bagaimana hubungan paradiplomatik secara teknis berlangsung yang dilaksanakan oleh aktor subnasional dalam melakukan aktivitas lintas batas negara. *Pertama*, membentuk kementerian atau departemen yang secara khusus bertanggung jawab atas urusan kerja sama internasional. Kuznetsov menyebutkan hal ini merupakan pilihan yang tepat bagi aktor subnasional untuk membangun lembaga birokrasi yang terpisah untuk fokus mengurus dan mengkoordinasikan kebijakan serta merancang program-program kerja sama, serta menjadi aktor utama dalam membangun hubungan diplomasi dengan daerah di negara lain. *Kedua*, membuka kantor subnasional yang permanen di luar negeri. Kantor-kantor ini umumnya disebut sebagai parakonsulat karena sering memberikan dukungan dan konsultasi bagi masyarakat dalam mengembangkan kontak internasional dalam berbagai bidang seperti bisnis, budaya dan bidang lainnya.

Ketiga, adanya kunjungan resmi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke negara asing. Aktivitas ini diperlukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan perjalanan kunjungan dinas ke luar negeri untuk melihat secara langsung kondisi sosial dan menggali lebih dalam potensi yang dapat dikembangkan. Hal ini diperlukan dalam merancang program kerja sama yang efektif. *Keempat*, terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai acara internasional yang diselenggarakan oleh aktor asing. Partisipasi dalam agenda internasional ini seperti kegiatan pameran dan forum lainnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi wilayahnya. *Kelima*, membangun dan berpartisipasi dalam pembentukan jaringan global lintas batas sehingga pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan diplomatiknya. *Keenam*,

keikutsertaan pemerintah daerah dalam agenda kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh aktor mitra di luar negeri. Keterlibatan pemerintah daerah dalam agenda ini dapat berimplikasi pada hubungan baik antara pemerintah daerah di Indonesia dan daerah mitra lainnya di luar negeri (Kuznetsov, 2015).

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep paradiplomasi yang telah diuraikan diatas, penulis menarik argumen sementara bahwa Pemerintah DIY melakukan kerja sama dengan Prefektur Kyoto melalui:

- a. Pembentukan departemen khusus untuk mengurus urusan kerja sama internasional.
- b. Melakukan kunjungan resmi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke negara asing.
- c. Terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai acara internasional.
- d. Keikutsertaan pemerintah daerah dalam agenda kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh aktor mitra di luar negeri seperti pameran.
- e. Berpartisipasi dalam Jaringan Regional atau Organisasi Internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian dengan judul “Praktik Paradiplomasi dalam Sektor Budaya: Studi Kasus Kerja Sama *Sister Province* Pemerintah Daerah DI Yogyakarta dan Prefektur Kyoto” ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang digunakan oleh peneliti banyak berupa kalimat dan frasa.

1.8.2 Subjek Penelitian

dalam penelitian ini adalah kerja sama *sister province* pemerintah daerah DIY dan prefektur Kyoto. Selanjutnya, objek penelitiannya adalah implementasi praktik paradiplomasi selama 10 tahun dari 2012 – 2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan literatur secara tidak langsung seperti buku, jurnal, situs resmi, laporan resmi organisasi dan pemerintah, surat kabar, serta berita-berita terkini mengenai isu yang diteliti oleh penulis. Penulis juga akan melakukan wawancara langsung bersama dengan instansi terkait.

1.8.4 Proses Penelitian

Data-data yang telah dikumpulkan melalui sumber bacaan akan dikaji secara mendalam oleh penulis, kemudian proses akan dimulai dengan memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan benar-benar dan dijamin kebenarannya sebagai sumber pokok penulis memaparkan isu yang sedang diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

1. Bab 1: Pendahuluan

Menerangkan secara umum mengenai isu yang akan diteliti

2. Bab 2: Profil Kerja Sama *Sister Province* Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto

Menerangkan aktivitas kerja sama yang dilaksanakan oleh DIY dan Prefektur Kyoto: kaleidoskop kerja sama, peluang kerja sama internasional di Yogyakarta dan regulasi kerja sama paradiplomasi di Indonesia.

3. Bab 3: Analisis

Berisi analisis dari data-data yang terlampir pada bab sebelumnya dengan menggunakan kerangka pemikiran dari konsep Kuznetsov untuk menjawab rumusan masalah.

4. Bab 4: Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, di mana akan dirangkum poin-poin penting sebagai jawaban dari rumusan masalah sekaligus menjadi bagian akhir dari penelitian.

BAB 2

KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA DAN KYOTO

Partisipasi negara dalam politik internasional adalah salah satu strategi untuk mencapai kepentingan nasional yang dimilikinya. Setiap negara akan menempuh jalan-jalan diplomasi untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut. Upaya mempromosikan kebudayaan ini diwujudkan bersama dengan kerja sama *sister province* antara Yogyakarta dan Kyoto sebagai daerah dengan latar belakang serupa. Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kerja sama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai motif kerja sama keduanya dilihat dari potensi masing-masing daerah. Lebih lanjut juga akan dijelaskan mengenai regulasi kerja sama pemerintah Indonesia terhadap aktivitas paradiplomasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

2.1 Motif Kerja Sama DIY dan Prefektur Kyoto

Aset-aset kebudayaan tersebar di seluruh sudut provinsi Yogyakarta, sehingga sejumlah kawasan di daerah ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Potensi budaya Yogyakarta dibagi menjadi dua yakni budaya *tangible* (benda) dan budaya *intangible* (tak benda). Dilansir dari media sosial Humas Pemda DIY disebutkan bahwa kebudayaan menjadi satu dari 3 sektor strategis selain pariwisata dan pendidikan yang akan dijadikan unggulan Yogyakarta di level Asia Tenggara. Sektor-sektor tersebut dinilai mampu menjadi penyangga dari pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta (Humas DIY, 2022). Untuk

mewujudkan pembangunan jangka panjang pada 2025 mendatang, pemerintah kemudian menyusun rencana jangka menengah dengan melibatkan fokus budaya di dalamnya. Pemerintah daerah Yogyakarta menjadikan kebudayaan menjadi payung dalam pembangunan di segala bidang, hal ini ditunjukkan dengan upaya untuk terus melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan aset-aset kebudayaan (RKPD DIY, 2016).

Dilihat dari catatan inventarisasi potensi seni budaya di Yogyakarta yang tercatat sejak 2012 hingga 2022 kemarin tercatat terus mengalami perubahan dan penambahan (Bappeda Jogja, nd) hal ini mengisyaratkan adanya peluang yang baik bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Kebudayaan menjadi tonggak utama pembangunan Yogyakarta sehingga hal inilah yang mendorong semakin kuatnya upaya pengembangan budaya baik benda maupun tak benda. Sebanyak 27 budaya tercatat sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO, salah satunya yakni batik. Penguatan diplomasi budaya dibutuhkan untuk mengkomunikasikan kekuatan budaya DIY ke luar negeri sehingga meningkatkan pengakuan masyarakat dunia internasional terhadap karya dan warisan budaya DIY yang turut menjadi identitas paling lekat dari daerah ini.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Yogyakarta bersama dengan Kyoto menjalin hubungan kerja sama *sister province* dalam agenda praktik paradiplomasi. Kedekatan antara kedua daerah ini berawal dari adanya kesamaan latar belakang, yakni budaya. Kyoto dikenal sebagai Kota Sepuluh Ribu Kuil. Industri utama dari prefektur ini ialah kerajinan dan praktik tradisional Jepang seperti produksi kimono dan distrik geisha (UNESCO, nd). Kyoto juga secara aktif memperkenalkan budayanya melalui pertukaran domestik dan internasional

dengan terus gencar menciptakan budaya dan seni baru. Pemerintah Kyoto juga telah berkomitmen untuk merevitalisasi dan membangun komunitas masyarakat dengan berbasis kebudayaan, hal ini ditunjukkan dari adanya Deklarasi Kyoto sebagai *City Open to the Free Exchange of World Culture in 1978* (Kyoto City Official Website, 2022).

Melihat lebih jauh menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kuznetsov bahwa terdapat beberapa motif yang melatarbelakangi kerja sama dari kedua daerah. Dilihat dari proses awal pembentukannya, kerja sama ini dimulai dengan adanya faktor budaya di mana kedua aktor subnasional baik Yogyakarta dan Kyoto memiliki kesamaan identitas dalam hal budaya. Sehingga kerja sama sister province antara keduanya ini termasuk ke dalam motif budaya. Faktor ini umumnya melatar belakangi kerja sama pada daerah-daerah yang memiliki kekhasan budaya yang kental, seperti yang dimiliki oleh Yogyakarta dan Kyoto.

2.2 Regulasi Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah di Indonesia

Studi hubungan internasional bergerak semakin dinamis dari hari ke hari. Kerja sama internasional yang dulu identik dengan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam membangun hubungan diplomatik bersama negara lain, kini pemerintah daerah juga turut melaksanakan kerja sama internasional ini. Isu-isu internasional meluas ke banyak bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Diperlukan adanya inovasi dan kolaborasi pemikiran dari banyak aktor untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dengan keterlibatan aktor subnasional (Subagyo, 2016). Orientasi kerja sama aktor subnasional diubah dari kerja sama antar daerah menjadi kerja sama internasional, kerja sama pemerintah

daerah dengan pihak asing tersebut diwujudkan dalam praktik paradiplomasi (Mukti, 2015).

Kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini merupakan buah hasil dari adanya kebijakan desentralisasi yang dirancang oleh pemerintah pusat. Dalam UU No 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap daerah memiliki hak otonomi masing-masing sehingga diperkenankan untuk menjalin kerja sama internasional dengan daerah lain di luar negeri dalam rangka untuk pembangunan daerah dengan melibatkan potensi sumber daya yang ada dalam daerah tersebut. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 Pasal 367 Ayat 1 tentang Pemerintah Daerah pelaksanaan aktivitas kerja sama bertujuan untuk melaksanakan lima hal: 1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Pertukaran budaya, 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, 4) Promosi potensi daerah, dan 5) Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*UU No. 13 Tahun 2014*, nd).

Kerja sama internasional pemerintah daerah ini juga harus melalui persetujuan pemerintah pusat melalui kebijakan *One Gate Policy* dari Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, pemerintah perlu terlebih dahulu mengajukan rancangan kerja sama pada DPRD Provinsi, yang dalam hal ini DPRD Provinsi memiliki wewenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan pada pemerintah daerah terhadap perjanjian internasional dan memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Regulasi ini lebih spesifik dibahas pada pasal 101 Ayat 1 Huruf F dan G. Regulasi ini dilakukan untuk

memastikan bahwa kerja sama internasional yang dijalankan oleh pemerintah daerah ini tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia, serta untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Aktivitas paradiplomasi di tingkat daerah menciptakan koneksi dan keterkaitan yang erat dengan pemerintah pusat untuk bertukar informasi dan mengkoordinasikan tindakan serta kepentingan (Novialdi. R., dkk., 2022).

2.3 Kerja Sama *Sister Province* DIY dan Prefektur Kyoto

Melalui perjanjian yang ditandatangani pada 16 Juli 1985 di Kyoto, kedua daerah menyetujui berbagai program kerja sama pada banyak bidang, yakni: 1) Seni dan Kebudayaan, 2) Pendidikan dan Teknologi Sains, 3) Promosi Pariwisata, 4) Industri (Treaty Kementerian Luar Negeri, 1985). Pertunjukan dan pameran seni kebudayaan, pertukaran informasi mengenai tradisi seni dan kebudayaan, pelatihan teknik pelestarian cagar budaya serta pengembangan seni merupakan sub-sub kegiatan yang tertera dalam perjanjian kerja sama pada bidang seni dan kebudayaan. Kerja sama *sister province* ini disebut sebagai kerja sama persahabatan sekaligus menjadi kerja sama sepanjang masa oleh kedua daerah ini. Reafirmasi perjanjian secara *desk to desk* rutin dilakukan tiap 5 tahun untuk menegaskan poin-poin yang telah disepakati sejak 1985 silam. Sehingga lama kerja sama tetap terhitung dari tahun 1985 hingga kini.

Sejak penandatanganan MoU pada 16 Juli 1985 lalu, banyak program kerja yang telah dijalankan oleh kedua daerah, jika diulas balik dari awal terbentuknya kerja sama ini, program kerja sama di sektor budaya yang telah berhasil terlaksana yakni (Mukti, 2013): pengiriman misi kesenian di Kyoto, pengiriman juru pelihara

cagar budaya untuk mempelajari teknik konservasi di Kyoto. Pembelajaran yang telah didapatkan tersebut kemudian mampu membantu juru pelihara dalam melakukan renovasi beberapa cagar budaya di Yogyakarta. Kyoto juga terlibat dalam proses pemulihan ekonomi pasca erupsi Merapi dengan membangun organisasi Te Collabo (「てこらぼ」は) yang berfokus pada pengembangan UMKM industri kecil pengrajin batik Imogiri, batik kayu lurik Krapyak, dan pengrajin tenun serat alam Gamplong, kolaborasi ini bertujuan agar kerajinan industri Yogyakarta dapat menembus pasar internasional khususnya Jepang (Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019).

Pada usia kerja samanya yang telah menginjak lebih dari 30 tahun, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X menyatakan akan terus tetap bekerja sama dengan Kyoto. Hal ini dinyatakan pada kesempatan pertemuan kunjungan kehormatan dari Wakil Gubernur Kyoto Shuichi Yamauchi di Kepatihan Yogyakarta pada 2018 lalu (*Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2018) untuk meminta Yogyakarta mengirimkan keseniannya ke Kyoto dalam acara penyambutan peringatan 35 tahun kerja sama Yogyakarta dan Kyoto pada 2020. Terlihat harapan besar dari Pemda DIY untuk memperluas lingkup kerja sama pada investasi dan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan produk-produk kreatif.

Pertemuan pemimpin-pemimpin daerah juga aktif dilakukan oleh keduanya. Pada 24-30 Agustus 2015 lalu Gubernur DIY melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk menghadiri peringatan 30 tahun kerja sama DIY - Prefektur Kyoto sekaligus untuk melakukan penandatanganan naskah reafirmasi kerja sama kedua daerah. Di bulan berikutnya, pada 3-6 September pemimpin daerah Prefektur

Kyoto bergantian melakukan kunjungannya ke Yogyakarta untuk menghadiri kegiatan Jogja Japan Week sebagai bagian dari peringatan 30 tahun kerja sama. Pada 2020 kedua daerah juga merencanakan adanya kunjungan untuk memperingati kerja sama yang ke-35 yang akan dilaksanakan di kedua daerah. Namun, kegiatan ini terpaksa dibatalkan karena pandemi COVID 19 yang melanda dunia. Di tahun berikutnya, pada 2021 pandemi belum memberikan tanda mereda sehingga prosesi peringatan kerja sama sekaligus penyelenggaraan agenda penandatanganan reafirmasi perjanjian juga belum dapat dilaksanakan. Hingga tahun 2022, kegiatan yang masih terus terlaksana yakni pertukaran lukisan anak DIY - Kyoto. Sejak penulisan ini diselesaikan, agenda pertukaran lukisan anak yang baru saja diselenggarakan yakni pada 28-29 Januari 2023.

Tak henti di situ, pemerintah kedua daerah kembali mengupayakan rencana kunjungan ke Kyoto bersama Gubernur DIY dan delegasi lainnya. Kunjungan tersebut diagendakan untuk reafirmasi perjanjian dan mengunjungi Universitas Kyoto untuk menghadiri pertemuan bersama diaspora di Kyoto serta untuk mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jepang. Namun, rencana ini harus kembali dibatalkan karena penyebaran pandemi COVID 19 di Kyoto kembali meningkat. Hingga kini, pemerintah kedua daerah tengah mencari alternatif lain dalam waktu dekat untuk melakukan reafirmasi perjanjian kerja sama secara virtual atau *desk to desk*.

Selama lebih dari 30 tahun perjalanannya, kerja sama ini mengalami banyak dinamika naik dan turun. Kerja sama ini masih menemui tantangan dalam memperbarui gagasan yang inovatif untuk mengisi kerja sama menjadi kerja sama yang semakin efektif dengan mempertimbangkan asas manfaat yang akan

didapatkan oleh kedua negara dan menggali seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua daerah. Aktivitas hubungan luar negeri yang semakin meningkat juga tidak dibersamai dengan penambahan SDM yang memadai, sehingga hal ini menjadi tantangan bersama dalam mengelola kerja sama luar negeri khususnya untuk Yogyakarta.

Tak hanya itu, kerja sama ini juga dihadapi dengan tantangan klasik pada pembagian porsi anggaran yang terbatas sehingga berpengaruh pada aktivitas kerja sama. Tantangan lain yang dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan di seluruh dunia dan tak hanya dihadapi oleh DIY dan Kyoto yakni pandemi COVID 19. Arah masa depan paradiplomasi di Kawasan Indo Pasifik harus menghadapi tantangan dari konsekuensi yang diakibatkan dari pandemi COVID 19 berupa kontraksi ekonomi (Tidwell, 2020) di mana hal ini kemudian turut menghambat aktivitas kerja sama secara fisik, sehingga banyak program kunjungan yang akhirnya terpaksa dibatalkan. Pada tahun 2023 ini pemerintah Indonesia terlihat mulai mengambil langkah untuk melonggarkan pembatasan aktivitas. Hal ini disambut baik oleh Yogyakarta untuk kembali menyelenggarakan pameran lukisan anak yang dilaksanakan pada Januari 2023.

Melalui pertemuan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji di Kompleks Kepatihan yang didampingi oleh Agus Priyono sebagai Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY menyampaikan bahwa kerja sama *sister province* harus terus diperkuat terutama pada program pertukaran budaya dan penguatan sumber daya manusia yang telah berjalan 35 tahun (Humas DIY, 2022) sejalan dengan kesepakatan awal bahwa kerja sama ini akan menjadi kerja sama sepanjang masa. Namun, dalam waktu dekat, belum ada agenda khusus yang akan

dijalankan oleh keduanya karena masih meletakkan fokus utamanya pada pemulihan pasca pandemi COVID 19.



BAB 3

INSTITUSIONALISASI KERJA SAMA *SISTER PROVINCE* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KYOTO

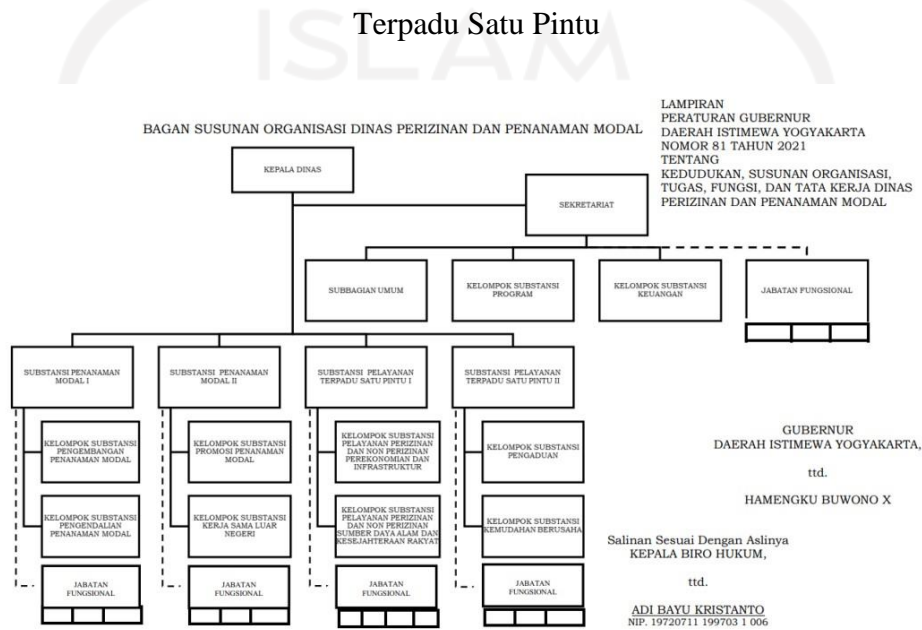
Konsep *Institutionalization of Paradiplomacy* yang dikemukakan oleh Kuznetsov membedah berbagai upaya aktor subnasional dalam melakukan hubungan internasional untuk melihat fenomena paradiplomasi secara institusional. Terdapat enam tindakan dari aktor subnasional dalam melaksanakan aktivitas yang melintasi batas negara secara teknis. Dalam bab ini penulis akan membahas terkait proses institusionalisasi dari kerja sama *sister province* antara DIY dan Prefektur Kyoto serta melihat proses institusionalisasi mana yang berjalan dan tidak berjalan.

3.1 Departemen Khusus untuk Urusan Kerja Sama Internasional

Departemen atau instansi khusus untuk mengurus urusan kerja sama internasional di daerah dan merupakan badan yang terpisah dari Kementerian Luar Negeri milik pemerintah pusat, disebutkan mampu mempermudah pemerintah daerah dalam membuat kebijakan mengenai kerja sama luar negeri. Adanya departemen khusus ini mengambil peranan penting dalam memfasilitasi kerja sama internasional secara lebih fokus atau departemen ini disebut oleh Kuznetsov dengan Kementerian Luar Negeri Subnasional (Kuznetsov, 2015). Instansi yang berkaitan dengan kerja sama luar negeri pemerintah DIY didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Instansi ini didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 66

Tahun 2018 di mana instansi ini memiliki tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan terkait penanaman modal dan kerja sama luar negeri yang lebih spesifik dikerjakan oleh Sub Koordinator Kerja Sama Luar Negeri (DPMPTSP, nd).

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Sumber: Pergub No. 81 Tahun 2021

DPMPTSP ini merupakan organisasi di bawah naungan Pemerintah Daerah DIY yang secara kedudukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerjanya diatur melalui Peraturan Gubernur DIY No. 81 Tahun 2021, di mana salah satu tugas dan fungsi DPMPTSP yang berkaitan untuk mengurus urusan kerja sama luar negeri yakni sebagai instansi yang melaksanakan penyelenggaraan dan pemantauan evaluasi kerja sama luar negeri. Kuznetsov menambahkan bahwa sumber daya yang tergabung dalam departemen kerja sama internasional daerah ini juga harus memiliki latar belakang yang memahami politik internasional

(Kuznetsov, 2015). Hal ini ditunjukkan oleh Kepala Sub Koordinator Bidang Kerja Sama Luar Negeri yang menjabat pada periode ini memiliki latar belakang pendidikan pada Hubungan Internasional (DPTMPTSP, nd). Sehingga, hal ini dapat mempermudah instansi tersebut dalam mengatur kebijakan dan regulasi yang jelas mengenai penyelenggaraan dan evaluasi kerja sama luar negeri DIY.

3.2 Kantor Subnasional yang Permanen di Luar Negeri

Dibangunnya kantor subnasional yang permanen di luar negeri ini dikenal juga dengan parakonsulat di mana kantor ini akan memberikan dukungan dan pelayanan berupa konsultasi bagi masyarakat dalam mengembangkan kontak internasional dalam berbagai bidang. Kantor ini akan menjadi fasilitas bagi pemerintah daerah untuk mempermudah dan menguatkan komunikasi bersama dengan subnasional mitra kerja sama. Aspek ini merupakan aspek penting bagi sebuah negara yang menjalin kerja sama dengan negara lain, seperti negara atau pemerintah pusat yang membuka kantor perwakilannya di luar negeri, pemerintah daerah juga membutuhkan kantor ini dalam pelaksanaan kerja samanya (Kuznetsov, 2015).

Yogyakarta dalam kerja samanya bersama Kyoto tidak membangun kantor perwakilannya di Kyoto, hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Lembaga di Luar Negeri pada Pasal 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut harus memenuhi persyaratan berikut: a) Mempunyai hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia, b) Merupakan urusan pemerintah daerah, c) Pemerintah tidak

membuka kantor perwakilan di luar negeri, d) Pemerintah daerah di luar negeri tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan e) Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Kelima tata cara pelaksanaan tersebut menjadi pondasi yang harus dipegang erat bagi pemerintah daerah yang menjalin hubungan kerja sama luar negeri (*Permedagri No.5 Tahun 2020*, nd).

Huruf C menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk membuka kantor perwakilannya di luar negeri hal ini merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir dan menghindari adanya ancaman di segala bidang (Mukti, 2013). Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan luar negeri, sebagai upaya untuk mempertahankan konsistensi kebijakan luar negeri tersebut, maka pemerintah tidak memperkenankan pemerintah daerah untuk membuka kantor perwakilannya di luar negeri karena dikhawatirkan akan bertentangan dengan kebijakan yang telah disusun sehingga dalam hal kerja sama internasional ini dan juga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai penghubung komunikasi dengan subnasional mitra melalui kantor perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah pusat.

3.3 Kunjungan Resmi yang Dilakukan Pemerintah Daerah ke Negara Asing

Kunjungan ini merupakan salah satu bagian penting yang tak terpisahkan dari praktik paradiplomasi dilihat dari seberapa sering kunjungan ini dilaksanakan

oleh kedua pihak. Aktivitas kunjungan resmi ini kemudian juga menjadi agenda penting di tengah masifnya hubungan kerja sama dengan jalur non formal sehingga kunjungan resmi dapat merepresentasikan aktivitas formal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kuznetsov, 2015).

Selama kerja sama sister province ini berjalan, Yogyakarta sering melakukan kunjungan resmi ke Kyoto dan sebaliknya. Keduanya rutin dan bergantian untuk saling mengunjungi dalam agenda *Reaffirmation of the Friendly Relations Agreement* yang dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Reafirmasi kerja sama ini merupakan agenda untuk penegasan kembali persetujuan hubungan kerja sama persahabatan antara kedua daerah dan melalui reafirmasi ini diharapkan keduanya mampu memberikan fasilitas yang lebih efektif terhadap kerja sama dan mendorong semua instansi yang terkait untuk membantu merealisasikan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati. Sayangnya, agenda penandatanganan pada 2020 kemarin terpaksa harus dibatalkan karena masih terdapat ancaman penyebaran COVID 19 (DPMPTSP, nd).

Sebelum merebaknya pandemi COVID 19, pertemuan pemimpin-pemimpin daerah ini aktif dilakukan oleh keduanya. Pada 24-30 Agustus 2015 lalu Gubernur DIY melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk menghadiri peringatan 30 tahun kerja sama DIY - Prefektur Kyoto sekaligus untuk melakukan penandatanganan naskah reafirmasi kerja sama kedua daerah. Dalam kunjungan ini pula, delegasi dari kedua wilayah juga melakukan pertemuan bisnis untuk membahas mengenai Te-Collabo terkait pengelolaan batik dan kimono. Di bulan berikutnya, pada 3-6 September pemimpin daerah Prefektur Kyoto bergantian melakukan kunjungannya ke Yogyakarta untuk menghadiri kegiatan Jogja Japan

Week sebagai bagian dari peringatan 30 tahun kerja sama. Pada 2019 perwakilan masyarakat Jepang menghadiri Yogyakarta untuk membahas mengenai persiapan acara yang akan diselenggarakan untuk memperingati 35 tahun kerja sama. Pertemuan ini secara simbolis dilakukan dengan penanaman pohon oleh masyarakat Jepang.

Pada agenda lain, Wakil Gubernur Kyoto Shuichi Yamauchi melakukan kunjungan kehormatan ke Yogyakarta untuk menghadiri pertemuan di Kepatihan Yogyakarta pada 2018 lalu. Beliau meminta pemerintah daerah Yogyakarta untuk mengirimkan keseniannya ke Kyoto dalam acara penyambutan peringatan 35 tahun kerja sama. Bersamaan dengan agenda ini pula, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X juga turut menyampaikan akan terus bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan Kyoto. Selama kerja sama ini, intensitas dari kunjungan resmi yang dilakukan oleh keduanya cukup sering, namun sayangnya, sejak penyebaran COVID 19 banyak agenda kegiatan yang kemudian terpaksa harus ditunda bahkan dibatalkan. Dilansir dari hasil wawancara bersama DPMPTSP bahwa baik dari sisi persiapan hingga biaya dibebankan pada daerah yang menyelenggarakan agenda kegiatan. Kunjungan yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mendekatkan hubungan kedua belah pihak (DPMPTSP, nd).

3.4 Berpartisipasi dalam Agenda Internasional yang Diselenggarakan oleh Daerah Mitra

Penyelenggaraan agenda internasional ini bertujuan untuk menampilkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk ditunjukkan di luar negeri

khususnya pada daerah mitra kerja sama. Agenda ini dapat dikemas melalui kegiatan pameran dan forum lainnya. Langkah ini merupakan salah satu upaya krusial untuk mempromosikan dan menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh daerah yang kemudian dapat merepresentasikan peluang kerja sama. Keterlibatan dua daerah dalam agenda ini mempengaruhi proses institusionalisasi paradiplomasi (Kuznetsov, 2015).

Sejak terjalinnya kerja sama hingga sekarang, Yogyakarta dan Kyoto telah berhasil melaksanakan banyak kegiatan untuk keberlangsungan kerja sama. Kedua daerah ini memiliki agenda rutin yang terus dijalankan hingga kini yakni program pertukaran lukisan yang menjadi program tahunan. Lukisan-lukisan ini akan dipamerkan di Yogyakarta dan Kyoto. Lukisan dari Yogyakarta akan dikurasi terlebih dahulu untuk kemudian dikirimkan ke Kyoto untuk dipamerkan di khalayak umum dan begitu sebaliknya. Karya lukisan dari Kyoto akan dipamerkan di Yogyakarta. Agenda ini selain untuk merepresentasikan kedekatan keduanya, tetapi juga bertujuan untuk saling memperkenalkan potensi seni dan budaya yang dimiliki oleh sumber daya pada masing-masing daerah. Pameran lukisan ini baru-baru ini dilaksanakan pada 28-29 Januari 2023 di Yogyakarta.

Komitmen kerja sama lainnya juga diwujudkan dalam penyelenggaraan lomba lukis yang dilaksanakan pada 2017 lalu. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari misi kebudayaan untuk saling menguatkan dalam hal kesenian. Keduanya juga berkomitmen untuk berkolaborasi pada produk unggulan yang dimiliki masing-masing daerah. Hasil dari kerja sama ini membawa keduanya untuk menggabungkan batik dan kimono, kerja sama ini melibatkan pelaku usaha tenun dari Jepang dan pengrajin batik di Yogyakarta. Program ini bermula dari

permintaan khusus dari keluarga keraton untuk membuat kimono dengan corak batik hingga akhirnya disetujui pada 2021 oleh pihak Kyoto dan mulai diproduksi sesuai permintaan. Produk unggulan ini kemudian juga tak ketinggalan untuk dipamerkan dalam berbagai agenda kerja sama baik yang dilaksanakan di Yogyakarta maupun Kyoto. Tak hanya Yogyakarta, Kyoto juga melakukan pengembangan seni dan kebudayaan secara masif. Prefektur ini aktif memperkenalkan beragam budaya melalui pertukaran budaya baik secara domestik dan internasional untuk terus menciptakan inovasi seni dan kebudayaan baru (*Kyoto City Official Website, 2022*).

3.5 Pembentukan Kelompok Kerja Regional

Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi membuka jalan untuk aktor subnasional dalam melaksanakan aktivitas internasional selaras dengan perkembangan diplomasi yang bersifat adaptif dalam merespon situasi global yang semakin terintegrasi dalam menghadapi isu-isu yang semakin kompleks. Kondisi ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk membangun forum kerja sama regional dan lintas batas untuk membahas masalah-masalah yang lebih spesifik seperti pertanian, pembangunan berkelanjutan, energi, transportasi, dan sektor lainnya. Pemerintah daerah yang terlibat aktif dalam forum ini akan memberikan kontribusi lebih besar pada kerja sama ini dalam membangun lebih banyak jaringan yang memiliki implikasi pada panggung internasional (Kuznetsov, 2015).

Selain memiliki instansi yang mengurus urusan kerja sama internasional, Yogyakarta dan Kyoto kembali menegaskan dalam *Agreement for the*

Establishment on Friendly Relations sebagai MoU tanda kesepakatan kerja sama mengenai panitia bersama yang terdiri dari pejabat DIY dan Kyoto untuk mengurus hal-hal mengenai fungsi, organisasi, dan tata kerja. Panitia dari masing-masing pihak tersebut harus menunjuk satu koordinator yang kemudian akan bertugas untuk mempersiapkan rapat komite, menyusun laporan rapat, dan ketika selma beberapa periode tidak diadakan rapat maka koordinator tersebut bertugas untuk tetap melihat kontrak bersama. Lebih lanjut, panitia bersama ini juga berfungsi untuk menyusun program tahunan, mengevaluasi dan memonitoring serta membahas hal-hal yang menguntungkan kedua pihak (MoU 16 Juli 1985, nd).

3.6 Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Agenda Internasional

Adanya keterlibatan dan partisipasi dari pemerintah daerah dalam agenda internasional yang diselenggarakan oleh aktor mitra di luar negeri ini akan meningkatkan hubungan baik antara kedua negara yang bekerja sama. Adanya langkah parsipatif ini juga akan memungkinkan kedua daerah untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor (Kuznetsov, 2015).

Yogyakarta menjadi daerah yang aktif terlibat dan ikut serta dalam berbagai kegiatan internasional ini. Sebagai tindak lanjut dari adanya kolaborasi produk perpaduan kimono dan batik ini, Yogyakarta bersama dengan KBRI Indonesia untuk Jepang bekerja sama untuk menyelenggarakan acara *fashion show* yang bertujuan untuk menunjukkan produk unggulan tersebut. Acara ini juga turut melibatkan pihak dari Kyoto sekaligus untuk memperingan jalinan persahabatan antara DIY dan Kyoto sehingga kegiatan ini juga diselenggarakan di Nishijin

Textile Centre. Agenda internasional tersebut merupakan wadah bagi kedua daerah untuk menonjolkan keunggulannya. Dengan adanya produk kolaborasi ini menambah nilai batik untuk semakin di kenal di kancan internasional sehingga meningkatkan identitas budaya yang lebih kental bagi Yogyakarta.



BAB 4

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang membahas mengenai institusionalisasi kerja sama *sister province* DIY dan Prefektur Kyoto dalam sektor budaya. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan rekomendasi ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait dan pada peneliti selanjutnya untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan tulisan ini.

4.1 Kesimpulan

Hubungan paradiplomasi antara Yogyakarta dan Kyoto diinisiasi dari kedekatan antara Sri Pakualam VIII dengan Gubernur Prefektur Kyoto yang sempat bertugas di Yogyakarta dalam urusan militer. Banyaknya kesamaan latar belakang baik secara historis maupun kebudayaan juga memperkuat keduanya untuk membangun kerja sama *sister province* yang diresmikan melalui penandatanganan MoU (*Momeration of Understanding*) pada 16 Juli 1985. Keduanya sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang: 1) Seni dan Kebudayaan, 2) Pendidikan dan Teknologi Sains, 3) Promosi Pariwisata dan 4) Industri. Kedua subnasional menyebut kerja sama ini sebagai kerja sama persahabatan sekaligus menjadi kerja sama sepanjang hidup. DPMDPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Yogyakarta menjelaskan bahwa proyeksi masa depan dari kerja sama antar kedua daerah ini akan terus berjalan sepanjang waktu dengan berbagai rancangan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Kerjasama tersebut diimplementasikan melalui program-program kegiatan yang berhasil terlaksana, seperti pengiriman misi kesenian ke Kyoto, pemberian beasiswa, kolaborasi produk unggulan dari masing-masing daerah, dan pameran lukisan anak-anak. Keduanya juga aktif melaksanakan pertemuan pemimpin-pemimpin, baik yang dilaksanakan di Yogyakarta maupun Kyoto. Selain melaksanakan program kegiatan, keduanya juga aktif melaksanakan kunjungan resmi sebagai bentuk untuk meningkatkan tali persahabatan dari hubungan kerjasama. Kebudayaan menjadi satu bagian penting dari kedua daerah ini, sehingga tak ayal jika orientasi kerjasama keduanya terletak pada bidang kebudayaan dengan tetap merancang program pada sektor-sektor lain.

Yogyakarta memiliki visi sebagai daerah pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka tahun 2025 mendatang di mana visi ini tercantum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang kemudian dikerucutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017 dan 2017-2022. Langkah mencapai visi tersebut dilakukan melalui upaya pemerintah untuk memperkuat diplomasi budayanya melalui kerjasama internasional.

Terdapat enam bentuk upaya paradiplomasi yang dikonsepsikan oleh Kuznetsov dan Yogyakarta melaksanakan lima dari keenam bentuk kegiatan tersebut yakni:

1. Membentuk departemen atau instansi khusus untuk mengurus urusan kerjasama internasional.
2. Melaksanakan kunjungan resmi.

3. Berpartisipasi dalam agenda pameran dan forum lainnya.
4. Membentuk kelompok kerja regional.
5. Pemerintah DIY ikut serta dalam agenda internasional.

Satu hal yang tidak terlaksana dalam kerja sama keduanya yakni pembentukan kantor perwakilannya di luar negeri. Hal ini sebagai bentuk untuk mematuhi peraturan dan regulasi mengenai tata cara kerja sama internasional pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

4.2 Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memetakan beberapa rekomendasi, diantaranya:

Kedua, baik pemerintah daerah Yogyakarta maupun Kyoto perlu kembali mengadakan pertemuan untuk melaksanakan kegiatan curah pendapat guna memperbarui gagasan terhadap program-program kerja sama. Apabila kerja sama ini tidak menemui inovasi baru, maka dikhawatirkan kerja sama ini akan menjadi kerja sama formalitas di atas kertas saja.

Ketiga, penelitian ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan diperlukan butir-butir penjelasan yang lebih komprehensif. Sehingga, untuk menyempurnakan penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang melatarbelakangi kerja sama ini menjadi tidak seaktif pada awal mula pembentukannya dan sejauh mana kerja

sama ini dapat memberikan implikasi yang signifikan terhadap masyarakat di kedua daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinu Supriyanto & Andi ATT . (2014). Pengembangan Potensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kerja Sama Sister Province
- Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*. Frank Cass Publisher.
- Alfarisi, H. (2021). Analisis Kerja Sama Pemerintah Regional DIY dan Kyoto: Sekarang dan Masa Mendatang. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial*, 3(1).
- BPK RI. (n.d.). *UU Nomor 23 Tahun 2014* . Retrieved from JDIH BPK RI : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Duchacek, I. (2001). Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations . In H. J. Soldatos, *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units* (pp. 2-3). Oxford : Clarendon Press.
- Humas DIY. (2022, April 21). *Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved December 10, 2022, from <https://jogjaprovo.go.id/berita/program-sister-province-kyoto-diy-kembali-diperkuat>
- Kuznetsov, A. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs* . London and Newyork: Routledge: Taylor & Francis Group .
- Kyoto, Japan | Diversity of Cultural Expressions*. (n.d.). UNESCO. Retrieved December 24, 2022, from <https://en.unesco.org/creativity/story/kyoto-japan>
- Lecours, A. (2008). Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Development World . *Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'* .
- Mia Intentilia dan Surya Putra. (2021). From Local to Global: Examining Sister City Cooperation as Paradiplomacy Practice in Denpasar City, Bali, Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 357-367.
- Mukti, T. A. (2015, Januari). Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1)
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy; Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemda Indonesia*. The Phinisi Press Yogyakarta.
- Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Bunga Rampai Kerja Sama Luar Negeri*.
- Permenlu RI. (2006). *Panduan Umum TataCara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

- Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. (2018, August 24). Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved December 24, 2022, from <https://jogjaprov.go.id/berita/pemda-diy-lanjutkan-kerjasama-dengan-kyoto>
- Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. (2022, June 28). Portal Resmi - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved January 26, 2023, from <https://jogjaprov.go.id/berita/sri-sultan-menerima-bintang-tanda-jasa-dari-kaisar-jepang>
- Rakhahari Chatterji & Swagata Saha. (2017). Para-diplomacy: Concept and the Context. *India Quarterly*, 73(4), 1-20.
- Risky Novialdi A, Saddam Rasanjani B, Ismar Ramadani A. (2022). The Practice of Paradiplomacy in Indo Pacific Region: Opportunities and Challenges . *International Journal of Advance in Social Science and Humanities* .
- Rustandi, C. (2019 , February 14th). *Indonesia and Japan: a role model in bilateral relations*. Retrieved from Eria: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : <https://www.eria.org/news-and-views/indonesia-and-japan-a-role-model-in-bilateral-relations/>
- Soldatos, P. (2001). An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors . In H. J. Soldatos, *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units* (pp. 46-63). Oxford : Clarendon Press .
- Subagyo, A. (2016, Desember). Studi Hubungan Internasional di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Prospek. *Dinamika Global*, 01(02). Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Prospek. *Dinamika Global*, 01(02).
- Sundryani, F. (2017, April 21). *Yogyakarta is Ideal Place to Develop Creative Industries: Jokowi* . Retrieved from The Jakarta Post : <https://www.thejakartapost.com/news/2017/04/21/yogyakarta-is-ideal-place-to-develop-creative-industries-jokowi.html>
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and States as Global Actor* . New York : Oxford University Press
- Te Collabo: Technology Collaboration. (2006). てこらぼ (te-collabo) : 京都インドネシア技術交流プロジェクト. Retrieved December 11, 2022, from <http://www.tecollabo.net/index.html>
- Tedy Gunawan & Ely Susanto . (2020). Review of Sister Province Cooperation Between the Special Region of Yogyakarta and Kyoto . Universitas Gadjah Mada .
- Topics - Indonesia and Japan - 50 Years of Partnership*. (n.d.). Embassy of Japan in Indonesia. Retrieved January 31, 2023, from https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/en/topics_ginajar.htm
- Treaty Kementerian Luar Negeri. (1985, Juli 16). *Agreement for The Establishment of Friendly Relations Between The Government of The Province of Yogyakarta Special Territory, Republic of Indonesia and*

Governement of Kyoto Prefecture, Japan.
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=JPN-1985-0150.pdf>
Wahyuni, S. (2018, October 25). *Yogyakarta named ASEAN City of Culture - Art & Culture*. The Jakarta Post. Retrieved December 10, 2022, from <https://www.thejakartapost.com/life/2018/10/25/yogyakarta-named-asean-city-of-culture.html>

Wolff, S. (2009). *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*.

“京都市 : Kyoto as a Cultural Capital of the World.” *京都市*, November 2022, <https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000305429.html>.



LAMPIRAN

**Wawancara bersama Bapak Catur Cahya Nurseta dan jajaran staff
DPMPTSP (Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**

